

## **PENDEKATAN UNHCR DALAM MENGUPAYAKAN RUANG KEMANUSIAAN PENGUNGSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

### **INTISARI**

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan pendekatan yang dilakukan *United Nations of High Commission for Refugee* (UNHCR) dalam merealisasikan terselenggaranya ruang kemanusiaan pengungsi yang optimal di Indonesia dan Malaysia. Status kedua negara sebagai bukan peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 membuat negara terlepas dari tanggung jawab penanganan pengungsi dalam rezim global meskipun berperan sebagai negara tujuan singgah. Situasi ini kemudian memunculkan persoalan *gap of protection*, yakni kekosongan atau minimnya skema perlindungan pengungsi karena statusnya sebagai imigran ilegal sehingga justru berpotensi menempatkan pengungsi dalam kerentanan hidup di kedua negara. Menyikapi minimnya peran negara, UNHCR sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat penuh atas populasi pengungsi mengambil alih tanggung jawab tersebut. Konsep *Humanitarian Space as People Protection Space* digunakan untuk mengklarifikasi penggunaan konsep ruang kemanusiaan yang kontestatif di dalam studi kemanusiaan, yang pada penelitian ini menyimpulkan *people-centered base* sebagai sebuah pendekatan. Untuk mendalami upaya aksi UNHCR, analisa berdasarkan *Egg Model Humanitarian Protection* menerjemahkan perbedaan kinerja dan pencapaian organisasi di kedua negara. Selain dikarenakan karakter celah ruang kemanusiaan dan politik domestik kedua negara yang berbeda, konstruksi relasi antara UNHCR dengan negara cukup memberikan pengaruh terhadap kinerja organisasi dalam mengupayakan ruang kemanusiaan perlindungan pengungsi.

**Kata kunci:** UNHCR, Perlindungan Pengungsi, Ruang Kemanusiaan, *Gap of Protection*, *Egg Model Humanitarian Protection*

## **ABSTRACT**

This thesis aims to analyze the attempts of *United Nations of High Commission for Refugee* (UNHCR) in realizing humanitarian space for refugees in Indonesia and Malaysia. The two countries' status as *non 1951 Refugee Convention Signatory* leads to the consequences of responsibility disengagement toward refugee issues. Still the refugee crisis occurred within national sovereignty due to the state posture as transitory countries. This circumstance of low state's performance to respond refugee crisis leads to what it is so-called as *gap of protection* that subsequently put refugees into the plight of massive vulnerability under the status as illegal migrant. Responding to this, UNHCR as international legitimated body holding the whole authority toward refugee population and issue take the responsibility over. *Humanitarian Space as People Protection Space* is purposively used in this paper to clarify the contested humanitarian space concept being applied into *people-centered base* approach. Furthermore, to address UNHCR's efforts in this paper, the finding is explained using *Egg Model Humanitarian Protection*. To conclude, this paper finally discovers that UNHCR attempts and approaches in the two non-refugee convention signatory to realize humanitarian space for refugees remain dissimilar. Aside of the diverse humanitarian space character and political context between two countries, the relationship amongst UNHCR and government quite determines organization way of approaches.

**Keywords: UNHCR, Refugee Protection, Humanitarian Space, Gap of Protection, Egg Model Humanitarian Protection**